

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang suku sudah ada sejak zaman nenek moyang dan merupakan tradisi bagi setiap suku di wilayah pegunungan untuk mempertahankan hidup. Berdasarkan hasil wawancara (tanggal 15 Maret 2018 di Semarang) terhadap K (30 th), tokoh pemuda asal suku Amungme selaku anak kepala perang menerangkan bahwa, perang suku skala besar pertama terjadi pada tahun 1997 di Tembagapura (wilayah suku Amungme) antara suku Amungme dengan Suku Dani dan Damal. Faktor penyebab terjadinya perang suku ialah adanya dugaan perselingkuhan antar klan. Akhir dari konflik tersebut ratusan orang meninggal dan puluhan orang hilang terseret arus sungai setempat.

Perang suku kedua pada suku Amungme terjadi pada tahun 2003 di Kabupaten Mimika kota Timika. Berdasarkan hasil wawancara (tanggal 20 Februari 2018 di Timika) terhadap YK (57th) , selaku *woem mum* (kepala perang) saat itu menerangkan bahwa, faktor utama penyebab perang suku ialah masalah pemekaran provinsi Papua tengah. Pada saat itu terdapat dua kelompok yaitu pro pemekaran dan kontra pemekaran. Kronologis perang suku awalnya terjadi saling lempar batu antara dua kubu di depan kantor yang rencananya akan dijadikan kantor gubernur Papua Tengah saat itu. Aksi saling lempar batu mengakibatkan

salah seorang dari kubu kontra penolakan pemekaran mengalami luka di bagian dada dan tidak bisa tertolong akhirnya meninggal. Kejadian tersebut menimbulkan amarah bagi kubu kontra pemekaran dan pada akhirnya terjadi perang antar kedua kelompok.

Menurut pemahaman peneliti bahwa kejadian perang suku yang terjadi di masa lalu tentu membuat suku Amungme mengalami trauma dan tidak ingin berperang. Suku Amungme saat ini telah memiliki pemahaman yang positif, karena banyak generasi suku Amungme yang mengenyam pendidikan tinggi selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Peneliti pernah memberikan pemahaman kepada masyarakat Amungme di Timika bahwa, sudah tidak seharusnya kita berperang karena akan menghabiskan banyak energi fisik, material dan beban psikologis. Hal ini sering disampaikan di gereja, kelompok pemuda dan tokoh masyarakat.

Kronologi perang suku yang dilakukan oleh suku kerabat yaitu suku Moni dan suku Dani pada tahun 2014 dipicu karena perebutan hak atas tanah di wilayah Jayanti Timika- Papua (Tim Liputan 6 SCTV, 2014). Perang suku pada tahun 2014 berlangsung hingga enam bulan merenggut korban 21 orang. Perang suku berakhir dengan proses “pematahan panah” dan “pembayaran kepala” korban perang sesuai tradisi perang suku yang berlaku. Satu korban dibayar sebesar 500 juta sesuai kesepakatan kepala perang saat itu (Richardo, 2015).

Menurut Kapolres Mimika AKBP Victor Daen Mackbon bahwa konflik sosial antar kelompok masyarakat terjadi beberapa kali di tahun

2016 di antaranya konflik warga Bugis dan warga Kei, warga Madura dan Kei dan konflik warga pegunungan Papua di Kwamki Narama serta konflik antar- warga suku Nduga di kilometer 11 Kadun Jaya Timika. Pada konflik antara warga Kei dan warga Toraja menewaskan 1 jiwa dan puluhan rumah dibakar, dan konflik perang suku di Kwamki Narama menewaskan belasan jiwa dan puluhan rumah dibakar, ironisnya pelakunya sampai saat ini belum ditangkap dan diproses secara hukum (Rayaposs, 2017)

Konflik yang terjadi di tahun 2017 di antaranya adalah pembunuhan salah seorang pemuda asal suku Damal. Pembunuhan tersebut mengakibatkan terjadi perang marga. Kejadian ini membuat situasi kota Timika kembali mencekam terlebih khusus di wilayah konflik yaitu distrik Kwamki Narama. Hal ini membuat masyarakat kembali tertekan secara psikologis terlebih khusus ibu- ibu dan anak- anak. Situasi kembali kondusif ketika ketua DPRD Mimika Elminun Mom melakukan pendekatan persuasif dengan warga dan pihak kepolisian sedang mengejar pelaku tersebut (Timexred, 2017)

Masyarakat yang ikut berperan saat perang suku dikategorikan sebagai *woem mee* (orang perang) adalah istilah masyarakat setempat dalam mempersepsikan identitas diri mereka. Kondisi psikologis pasca perang suku yang dialami ialah kecemasan, stress, depresi, trauma dan luka batin. Kondisi psikologis sangat sering dirasakan oleh anak- anak dan ibu- ibu. Bahkan saat ini dampak psikologis (takut keluar rumah, trauma dengan kondisi lingkungan dan sering cemas) yang dirasakan oleh remaja

awal dan dewasa awal. Untuk menyikapi persoalan psikologis masyarakat pasca perang suku tentu tidak mudah dan butuh pendekatan ekstra optimal.

Menurut pandangan peneliti bahwa, perang suku dan konflik intergrup yang terjadi di Kabupaten Mimika murni merupakan konflik sosial yang dilakukan oleh suku kerabat yang berdomisili di Timika. Faktor penyebabnya bervariasi sesuai kronologis di atas. Suku Amungme dan Kamoro sebagai suku asli melihat aktivitas konflik yang terjadi tidak etis dan patut diselesaikan melalui jalur hukum positif. Pemerintah Daerah, Agama, Lembaga Adat dan Penegak Hukum telah berupaya untuk menghentikan perang saudara di distrik Kwamki Narama tetapi masih dalam tahapan. Sementara ini berdasarkan pantauan peneliti beberapa waktu di Timika, bahwa aparat keamanan gabungan (Polisi dan TNI) berhasil mengamankan situasi bahkan menghancurkan tempat-tempat perkumpulan orang perang, namun hanya sebatas itu belum ada resolusi konflik.

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional pemikiran yang paling

berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx pada tahun 1950-1960 (Tualeka, 2017)

Dalam membahas berbagai situasi konflik Coser membedakan konflik yang realistik dan non realistik. Konflik yang realistik berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditunjukkan pada objek yang dianggap mengecewakan. Sedangkan konflik non realistik adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak (Demartoto, 2010)

Coser (dalam, Puloma, 2000) menerangkan bahwa konflik dengan kelompok luar akan membantu pemantapan batas- batas struktural (mempererat relasi sosial antar kelompok). Sebaliknya konflik dengan kelompok luar juga dapat mempertinggi integrasi di dalam kelompok. Sesuai pandangan di atas disimpulkan bahwa konflik antar kelompok akan menjadi baik karena bisa mempererat hubungan integral dalam kelompok.

Teori konflik di atas menerangkan sesuai fakta yang dialami masyarakat Papua lebih khusus Suku Amungme. Konflik realistik yang diatur oleh kepentingan orang lain lebih dominan dibandingkan konflik non realistik sesuai kronologis empiris dan mengarah pada perubahan fungsi struktural masing- masing kelompok yang berkonflik. Hal ini tentu menjadi tugas dan intervensi khusus dalam mengkaji makna konflik secara efisien.

Kabupaten Mimika adalah wilayah dataran rendah yang terletak di tengah pulau Papua dengan luas wilayah 21.695 Km², kepadatan penduduk di kabupaten Mimika hanya 9-10 jiwa per Km². Kepadatan tertinggi terjadi di distrik Kwamki Narama, yakni 547-548 jiwa per km² sedangkan kepadatan terendah terjadi di distrik Agimuga, yakni hanya 1 jiwa per Km². Penduduk kabupaten Mimika berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 205.591 jiwa yang terdiri atas 115.309 jiwa penduduk laki-laki dan 90.282 jiwa penduduk perempuan. Populasi penduduk tersebar di 18 distrik yang terdiri dari 19 kelurahan dan 133 kampung atau desa (Badan Pusat Statistik Mimika, 2017).

Suku Amungme menghuni tujuh belas lembah di bagian selatan pegunungan tengah Papua. Bersama dengan suku Damal yang menghuni bagian utara pegunungan. Tempat tinggal masyarakat suku Amungme secara random yaitu daerah perkotaan di Timika (Kwamki Lama, Kwamki Baru dan pemukiman transmigrasi), desa Banti di dekat Tembagapura termasuk Aroanop, Tsinga dan pemukiman-pemukiman di sebelah timur Tsinga yang terisolasi serta pemukiman dataran rendah yang tersisa di daerah Agimuga di sebelah timur Timika (Muller & Omabak, 2014).

Suku Amungme memiliki kekerabatan yang baik dengan suku pendatang di Timika. Moses Kilangin, Tokoh Agama dan perdamaian asal suku Amungme yang sering disebut *urumeki* (guru besar) adalah sosok inspiratif telah menanamkan nilai cinta kasih kepada masyarakat suku Amungme untuk saling mengasihi sesama tanpa melihat latar belakang

budaya. Beliau telah mewariskan budaya damai kepada suku Amungme sampai saat ini untuk selalu hidup berdampingan tanpa membedakan, hal ini peneliti mendengar waktu bersama Moses Kilangin di tahun 1995.

Perdamaian adalah tidak adanya atau berkurangnya segala jenis kekerasan, transformasi konflik kreatif non kekerasan. Perdamaian dibagi menjadi beberapa bagian di antaranya perdamaian negatif adalah tidak adanya segala jenis kekerasan, perdamaian alam adalah kerja sama spesies, bukan pertarungan. Perdamaian positif langsung terdiri dari atas kebaikan verbal dan fisik baik bagi tubuh, pikiran dan jiwa diri orang lain. Perdamaian positif struktural akan mengganti penindasan dengan kebebasan dan eksploitasi dengan persamaan, dan kemudian memperkuat ini dengan dialog dan bukan penetrasi. Perdamaian positif kultural akan menggantikan legitimasi kekerasan dengan legitimasi perdamaian, dalam agama, hukum, dan ideologi dalam seni dan ilmu (Galtung, 2003)

Perdamaian bukan hanya tidak adanya perang dan konflik di dunia melainkan perdamaian adalah sarana transformasi pribadi, kolektif dan aspirasi untuk membersihkan planet dari kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia. Cara dan tujuannya terus berlanjut, evolusi dialektis kadang-kadang mengalami kemunduran selama periode konflik kekerasan akut dan terkadang berkembang tanpa kekerasan dan kurang keras untuk mengaktualisasikan keadilan politik dan keadilan sosial (Galtung & Webel, 2007).

Etimologi perdamaian dari satu wilayah ke wilayah lain berbeda, kata perdamaian dan maknanya dikonstruksikan secara sosial oleh setiap masyarakat. Masyarakat Jerman memiliki istilah *Friede*, Bangladesh dengan *Shanti* dan Jepang dengan *Heiwa*. Indonesia mengenal istilah damai yang sering diartikan sebagai harmoni, ketenangan, dan ketentraman. Setiap daerah di Indonesia memiliki makna perdamaian berbeda seperti orang Jawa mengenal istilah *kerukunan* (harmoni), Kalimantan Barat dengan *basaru sumangat* (Susan, 2010).

Perdamaian memiliki arti yang berbeda bagi tiap individu. Pada umumnya perdamaian diartikan sebagai situasi aman di mana perang atau konflik tidak terjadi. Konsep perdamaian diartikan lebih jauh dari sekedar kondisi di mana setiap individu mendapatkan hak-haknya, bebas berpendapat, sejahtera, dan yang terpenting tidak mengalami kekerasan secara struktural (Sabban, 2015).

Perdamaian mencakup makna kemampuan dalam memahami dan mengelola perdamaian, namun perlu dilandasi oleh moral yang berkualitas untuk melakukan cara-cara damai dalam menyelesaikan persoalan. Konteks penyelesaian konflik Papua telah dirumuskan bersama di dalam beberapa pertemuan eksploratif yang telah menghasilkan rumusan bersama dalam bentuk matriks mengenai “Indikator Papua Damai” di dalam tiga bidang yang meliputi (1) politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia (2) sosial ekonomi, (3) sosial kebudayaan (Elisabeth, 2017).

Konsep teori makna yang menjadi pembedah pada riset ini mencakup pada konsep menurut pandangan Urata (2015). Untuk mengetahui pentingnya makna hidup pada setiap individu maka perlu melihat empat elemen dasar yaitu, makna dilihat secara personal, relasi, sosial/universal dan agama/spritual. Empat elemen penting dari makna hidup tentunya menjadi dasar untuk menemukan makna dari setiap individu dan kelompok.

Konsep makna personal mengarah pada *subyektive well-being* dan aktualisasi diri misalnya, kesehatan, penampilan, kebahagiaan, hedonisme, penerimaan diri, penerimaan, tanggung jawab, kreativitas, potensi aktualisasi diri dan pekerjaan seumur hidup. Konsep makna relasi mengarah pada hubungan keluarga, persahabatan, hubungan romantis dan persetujuan/penghormatan. Konsep makna sosial/universal mengarah pada kolektif/nilai universal misalnya, moral, kebenaran, kontribusi kepada masyarakat, hubungan dengan alam dan evolusi/generativitas. Konsep makna religius/spiritual mengarah pada transendensi diri misalnya, keyakinan agama dan kerohanian.

Makna perdamaian tentu menjadi sorotan utama pada saat konflik terjadi dan harapan setiap individu maupun kelompok akan menginginkan perdamaian. Timika menjadi tempat penelitian untuk mengkaji lebih mengenai makna konflik dan perdamaian bagi suku Amungme. Peneliti berasal dari Timika dan optimis untuk melakukan penelitian ini, karena masalah yang dikaji berdasarkan realita dan butuh solusi yang akurat.

B. Identifikasi Masalah

Pada latar belakang di atas dijelaskan mengenai konflik sosial di antaranya konflik intergroup (perang suku). Identifikasi masalah yang hendak menjadi kajian utama ialah bagaimana Suku Amungme melihat makna konflik intergroup (perang suku) dan makna perdamaian menurut suku Amungme.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui makna konflik intergroup bagi suku Amungme
2. Mengetahui makna perdamaian bagi suku Amungme

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang psikologi sosial khususnya psikologi konflik dan psikologi perdamaian pada suku Amungme

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi masukan kepada Pemerintah daerah Kabupaten Miimika mengenai konflik intergroup (perang suku) dan Perdamaian
- b. Memberi sumbangan pengetahuan dan model penanganan konflik pada suku Amungme.

- c. Memberi sumbangan pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat dan generasi muda suku Amungme mengenai makna perdamaian.

